

ANALISIS JEJARING AKTOR DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM KELURAHAN BUKIT CERMIN KOTA TANJUNGPINANG.

ANALYSIS OF ACTOR NETWORKS IN THE CLIMATE VILLAGE PROGRAM, BUKIT CERMIN SUB- DISTRICT, TANJUNGPINANG CITY.

Rezki Feni Oktaviana¹, Edison², Ramadhani Setiawan³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji
Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

E-mail: riski52626@gmail.com, edison@umrah.ac.id, ramadhanisetiawan@gmail.com

Abstrak: Program Kampung Iklim (Proklim) sebagai upaya untuk mengurangi perubahan iklim dengan memberdayakan masyarakat setempat untuk turut berkontribusi pada setiap upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan. Proklim dapat berjalan sukses karena adanya keterlibatan para aktor yaitu aktor Pemerintah, aktor pendukung dan aktor pelaksana yang bersifat partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan aktor yang terlibat di dalam Program Kampung Iklim Khususnya di Proklim Anggrek RW 06 Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui studi lapangan, observasi, pengamatan, wawancara tidak berstruktur, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam interaksi ini adanya keberhasilan penerapan jejaring aktor di dalam Proklim Anggrek RW 06 Kelurahan Bukit Cermin tercapai setelah terbentuknya jaringan aktor yang stabil melalui 4 tahapan translasi: *Moment of Problematization* (Problematisasi), *Moment of Interestment* (Penarikan), *Moment of Enrollment* (Pelibatan), *Moment of Mobilization* (Mobiliaasi) yang dilakukan oleh para aktor. *Obligatory Passage Point* (OPP) yaitu DLH Kota Tanjungpinang melakukan perannya sebagai inisiator dan para aktor saling mendelegasikan peran dan wewenang mereka serta senantiasa membimbing dan membina masyarakat dengan aksi mitigasi, aksi adaptasi dan membentuk suatu kelembagaan. Bagi aktor pemerintah dan aktor pendukung sebaiknya melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap aktor pelaksana serta memberi dukungan berupa materil dan non materil. Diharapkan dapat memperkuat ikatan jaringan didalam program sehingga Proklim Anggrek RW 06 dapat berjalan secara kontinu.

Kata Kunci: Jejaring aktor, Proklim, Bukit Cermin

Abstract: *The Climate Village Program is an effort to mitigate climate change by empowering local people to contribute to any adaptive and mitigating efforts made. The Climate Village Program is successful because of the involvement of actors, government actors, collaborative actors, and executive actors. This study aims to describe the role of actors involved in the Climate Village Program, especially in Bukit Cermin Village, Tanjungpinang City. The research method used is qualitative research methods. Sources of data were obtained through field studies, observations, unstructured interviews, and documentation. The data were analyzed by data analysis techniques through data reduction, data presentation, and concluding. The Climate Village Program in Bukit Cermin Village was achieved after the formation of a stable network of actors through 4 stages of translation: Moment of Problematization, Moment of Interest, Moment of Enrollment, Moment of Mobilization carried out by the actors. Obligatory Passage Point (OPP) namely DLH (Environmental Department) Tanjungpinang city performs its role as an initiator and actors delegate roles and authority to each other between actors and other actors and always guide and fosters the community with mitigation actions, adaptation actions, and forming an institution. The recommendation is for government actors and supporting actors, it is best to maintain regular monitoring and evaluation of executive actors as well as to provide support through materials and non-stamp. It is hoped that the RW 06 orchid Climate Village Program will be able to run continuously.*

Keywords: : Actor network, Proklim, Bukit Cermin

PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan merupakan upaya bersama semua pihak melalui pengembangan kemitraan seperti Pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat serta masyarakat secara luas. Pengelolaan lingkungan juga dilakukan sebagai salah satu upaya dalam pencegahan permasalahan atau kerusakan lingkungan yang termasuk didalamnya perubahan iklim. Di Indonesia sendiri, upaya dalam pengendalian perubahan iklim dinilai sangat penting terutama di daerah- daerah yang teridentifikasi rentan terhadap adanya perubahan iklim. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, KLHK berupaya mengurangi dampak perubahan iklim dengan mendorong kemitraan serta kolaborasi berbagai pihak yang bertujuan supaya mampu memperkuat kapasitas seluruh upaya adaptasi dan mitigasi perubahan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Program Kampung Iklim (Ismiarta et al., 2021).

Pelaksanaan Proklim menerapkan 2 (dua) pendekatan yaitu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan. Proklim bertujuan untuk mengurangi dalam perubahan iklim dengan memberdayakan masyarakat setempat dengan pendekatan tersebut para aktor pemangku kepentingan berinteraksi secara aktif dalam proses penyelesaian masalah terkait perubahan iklim untuk memperkuat kapasitas sosial ditingkat lokal maupun Nasional (PerDirjenPPI, 2017).

Proklim juga memanfaatkan potensi pengembangan wilayah ditingkat lokal serta sajiannya dalam bentuk data dan informasi yang menjadi bahan untuk dapat diolah dalam proses formulasi kebijakan, program, kegiatan, serta strategi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Guna mencapai manfaat tersebut Proklim dilakukan secara bertahap dan dijelaskan melalui gambar berikut:



Gambar 1 Target dan Sasaran Proklim di Indonesia
Sumber: Buku Pedoman Proklim KLHK

Proklim merupakan program yang ditargetkan dalam jangka panjang, hal ini terlihat dari target dan sasaran pencapaian Proklim yang direncanakan hingga tahun 2030 dan taerget implementasinya mencapai 10.000 kampung iklim di 34 Provinsi di Indonesia. Adapun target pencapaian melalui beberapa tahap diantaranya, pengembangan di tahun 2012, implementasi ditahun 2017, penguatan komitmen di tahun 2020, percepatan implementasi di tahun 2025, serta menuju pencapaian NDC (*Nationally Determind Contribution*) ditahun 2023 (Republic of Indonesia, 2016).

Kegiatan- kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan upaya adaptasi perubahan iklim adalah melalui kegiatan yaitu pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, kegiatan peningkatan ketahanan pangan, kegiatan pengendalian penyakit terkait iklim (Masripatin, 2017). Sedangkan, Kegiatan upaya Mitigasi perubahan iklim adalah melalui kegiatan yaitu pengendalian sampah, limbah padat dan cair, energi terbarukan, budidaya pertanian. Tutupan vegetasi, pencegahan kebakaran (PerMenLHK, n.d.)

Kota Tanjungpinang mempunyai Proklim meningkat maju ke tahap nasional, salah satunya Bukit Cermin yang mana pada 2019 lalu terpilih sebagai tempat pelaksanaan program Nasional melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang. Kelurahan Bukit Cermin Berhasil mengembangkan Kampung Iklim dengan didorong oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Program Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau meraih penghargaan pembinaan Program

Kampung Iklim (Proklim) tingkat kota dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Apresiasi pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) diberikan atas penetapan kebijakan dan peraturan, serta secara aktif melaksanakan pembinaan dan pendampingan untuk mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) di wilayah setempat yang menjadi kontribusi nyata Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Tiga kelurahan di Kota Tanjungpinang juga menerima apresiasi Program Kampung Iklim (Proklim) utama Tingkat Nasional tahun 2020 yaitu, RW 06 Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat yang terpilih sebagai lokasi terbaik dengan menerima penghargaan berupa piala, sertifikat, dan insentif. Kemudian diraih oleh RW 12 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur dan RW 03 Sungai Ladi, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota mendapat penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) utama berupa sertifikat. Pada tahun 2020 tema Festival Iklim disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini yaitu, penguatan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada masa pandemi COVID-19. Puncak Festival Iklim diberikan penghargaan Proklim untuk daerah yang memiliki inisiatif, komitmen, dan dedikasi serta diwujudkan dalam langkah nyata upaya pengendalian perubahan iklim yang dilakukan ditingkat tapak. Diantaranya seperti menanam, menghijaukan, menghutankan kembali, memilah sampah, menghemat pemakaian listrik dan air, tidak membakar sampah, hutan, dan lahan, serta meningkatkan ketahanan pangan dan bencana adalah contoh dari Program Kampung Iklim (Proklim) (Ogen, 2020).

Di Kota Tanjungpinang menerapkan dua cara untuk menghadapi perubahan iklim yaitu melakukan adaptasi dan mitigasi. Penerapan dua cara tersebut dikategorikan mampu untuk meminimalisir masalah perubahan iklim menurut Sistem Registrasi Nasional (SRN) karena dibantu

dengan adanya Proklim di Kota Tanjungpinang. Kepala DLH Kota Tanjungpinang menegaskan bahwa ada 3 manfaat dari proklim ini di Tanjungpinang: (Lintaskepri.com, 2020)

1. Untuk lingkungan, dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
2. Bagi masyarakat, dapat meningkatkan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim dan dampaknya.
3. Bagi pemerintah, tersedianya data adaptasi dan mitigasi iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal. Sehingga, menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan, strategi, dan program dalam mengendalikan perubahan iklim.

Berdasarkan data sebaran lokasi Proklim di Indonesia hingga tahun 2018, Provinsi Kepulauan Riau menempati peringkat ke 24 dengan jumlah mencapai 13 Proklim. Menurut data 2019 terdapat 6 lokasi Kampung Iklim di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjungpinang yaitu, Bukit Cermin, Senggarang, Air Raja, Batu IX, Sei Ladi, dan Tanjung Unggat. DLH Kota Tanjungpinang ingin setiap kelurahan mempunyai kampung iklim, total kelurahan di Tanjungpinang adalah 18 kelurahan namun, sejauh ini hanya 6 kelurahan saja yang menjalankan Program Kampung Iklim. Berikut merupakan data Proklim di Kota Tanjungpinang berdasarkan Kelurahan beserta penilaian:

Tabel 1 Lokasi Kampung Iklim Tanjungpinang Tahun 2019

No	Kelurahan	Penilaian
1	Bukit Cermin	Proklim Madya (54,87%)
2	Senggarang	Proklim Madya (51,57%)
3	Air Raja	Proklim Pratama (46,44%)
4	Batu IX	Proklim Pratama (43,46%)

5	Sei Ladi	Proklim Pratama (36,39%)
6	Tanjung Unggat	Proklim Pratama (29,11%)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tanjungpinang 2019

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan Proklim di Tanjungpinang. Pada Tahun 2019 Bukit Cermin menjadi Proklim Madya serta menjadi daerah yang mendapatkan penilaian tertinggi mengalahkan Senggarang. (Wahyu, 2019).

Jaringan yang terbangun antar aktor didalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan salah satu bagian terpenting dalam pengembangan suatu kelembagaan. Dalam konteks ini, Untuk menganalisa realitas, teori jejaring aktor menggunakan konsep translasi menjadi jelas mengapa suatu realitas sosial itu menjadi stabil atau tidak dalam jangka waktu tertentu.

Translasi dapat dipahami sebagai suatu proses dimana suatu aktor membentuk suatu aliansi yang menghasilkan jejaring aktor yang stabil. Penilaian terhadap pola jaringan aktor yang stabil dalam melaksanakan inovasi dapat diukur dengan menggunakan empat momen dasar yaitu momen problematisasi (*Momen of Problematization*), momen penarikan (*Moment of interessement*), momen pelibatan (*Moment of Enrolment*), dan momen mobilisasi (*Moment of Mobilization*) (Kusumawardhani, 2018).

Dalam interaksi sosial itu tentu ada nilai- nilai yang dibangun di antara para aktor tersebut. Bila ada penyesuaian yang menghasilkan kesepakatan berupa nilai-nilai baru yang disepakati, maka terbentuklah sistem baru atau adanya perubahan sosial (Alhogbi, 2017). Meskipun berasal dari teori sains, teori jejaring aktor merupakan teori sosial yang khas karena mampu mengungkap jaringan yang tidak kelihatan atau aktor- aktor yang berada dibelakang layar. Maka dari itu teori ini relevan digunakan untuk membahas peran aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim

(Proklim) Khususnya di Proklim Anggrek RW 06 Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang.

DLH Kota Tanjungpinang selaku *Obligatory Passage Point* (OPP) adalah aktor utama yang melakukan pendekatan kepada calon aktor baik yang bersedia bekerjasama atau menolak terlibat dalam menyelesaikan masalah perubahan iklim. Dengan di keluarkannya Instruksi Walikota Tanjungpinang Nomor 299 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim di Kota Tanjungpinang terdapat adanya aktor- aktor pemerintah yang terlibat serta adanya mitra kerjasama dengan aktor pendukung didalam proklim khususnya Proklim Anggrek RW 06 Kelurahan Bukit Cermin. Keterlibatan ini menambah interaksi didalam Program Kampung Iklim karena hal tersebut menjadikan sistem yang terbangun menjadi heterogen dimana yang terlibat ada pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dilihat, bahwa terdapat berbagai macam aktor pemberdayaan pada kegiatan Proklim Kota Tanjungpinang khususnya di Proklim Anggrek RW 06 Kelurahan Bukit Cermin yang keterlibatannya mendukung tercapainya tujuan pemberdayaan tersebut. Setiap aktor yang terlibat memiliki peran sesuai tugas dan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah dan swasta memiliki tanggungjawab yang sama di dalam menanggulangi perubahan iklim yang terjadi.

Kehadiran pemerintah didalam Program Kampung Iklim tentu saja menjadikan program tersebut sebagai jaringan yang heterogen. Dengan adanya heterogenitas tersebut maka akan sangat menarik jika dilihat bagaimana mereka masing- masing berperan dan menjalankan peranannya itu dalam satu misi yang sama. Tentu saja didalamnya terdapat adanya negosiasi- negosiasi dalam mencapai kesepakatan dalam pembagian peranan yang akan di jalankan aktor- aktor tersebut (Priyatma, 2013). Dengan sudah berjalannya Program Kampung Iklim di RW 06 Kelurahan Bukit Cermin menjadikan pelaksanaan kebijakan Proklim di wilayah tersebut dianggap hanyalah program dari salah satu dinas saja yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

Karena struktur birokrasi tidak kondusif sehingga dinas yang terlibat tidak efektif dalam pelaksanaannya. Dengan tidak memiliki batasan yang jelas dalam kerjasama dari aktor yang terlibat di dalam Program Kampung Iklim (Proklam) tersebut maka akan terjadi hambatan- hambatan sebagai berikut: (Ismiartha et al., 2021)

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait permasalahan perubahan iklim secara keseluruhan sehingga menciptakan kejenuhan yang terjadi dalam proses kegiatan.
2. Munculnya berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai keberlanjutan arah gerak setelah pengusulan dan implementasi proklam berjalan
3. Kegiatan evaluasi dan pemantauan yang sering dilewatkan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan pada proklam
4. Peran akademisi yang belum tampak secara jelas
5. Media promosi yang belum berjalan dengan baik seperti kegiatan proklam di wilayah lain
6. Pengisian Sistem Registri Nasional (SRN) yang dianggap rumit serta SDM yang kurang.

Dari uraian diatas, diketahui bahwa terdapat berbagai macam aktor pemberdayaan pada kegiatan Proklam Kota Tanjungpinang khususnya di Proklam Anggrek RW 06 Kelurahan Bukit Cermin yang keterlibatannya mendukung tercapainya tujuan pemberdayaan tersebut. Setiap aktor yang terlibat memiliki peran sesuai tugas dan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah dan swasta memiliki tanggungjawab yang sama di dalam menanggulangi perubahan iklim yang terjadi. Jika pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki tanggungjawab tersebut di dalam konsep pembangunan berkelanjutan, maka Kampung Iklim adalah jawabannya, sehingga Kampung Iklim bisa dipadukan dengan program pemerintah menjadi program bersama sebagai perwujudan dari pembangunan berkelanjutan.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena penelitian tentang program kampung iklim yang menggunakan konsep

jejaring aktor masih jarang dilakukan dan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi atau masukan bagi aktor Pemerintah, aktor pendukung, maupun aktor pelaksana dalam upaya mengoptimalkan program kampung iklim yang berada di Proklam Anggrek RW 06 Kelurahan Bukit Cermin.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan guna mengkaji kekuatan jejaring aktor dalam Proklam Anggrek RW 06 Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Proses pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis peran aktor dalam kegiatan Program Kampung Iklim (Proklam) yang berlokasi di Proklam Anggrek RW 06 Kelurahan Bukit Cermin. Analisis ini perlu dilakukan dalam rangka mengetahui peran serta jejaring aktor dalam Proklam Anggrek RW 06. Penelitian ini kemudian melihat siapa saja aktor yang terlibat dan bagaimana peran yang dilakukan oleh setiap aktor serta melihat kekuatan jejaring aktor dalam kegiatan program kampung iklim. Peneliti menggunakan konsep translasi dari teori Jejaring Aktor yang dikemukakan oleh Callon (1991) dalam (Yuliar, 2009) memiliki empat tahapan yaitu Momen Problematisasi (*Moment of Problematization*), Momen Penarikan (*Moment of Interesement*), Momen Pelibatan (*Moment of Enrolment*), dan Momen Mobilisasi (*Moment of Mobilization*) sebagai berikut:

1. Momen Problematisasi (*Moment of Problematization*)

Problematisasi terjadi ketika suatu isu atau masalah dihadirkan oleh sebuah aktor (inisiator aksi) untuk menjadi perhatian aktor-aktor lain, dan ditransformasikan kadalam masalah-masalah yang didefinisikan oleh aktor-aktor lain. Aktor yang menginisiasi aksi tersebut berupaya mentranslasikan aktor-aktor lain dengan cara mengangkat isu tersebut. Ditahap ini satu atau lebih aktor kunci merumuskan masalahnya serta mendefinisikan peran aktor lain dalam penyelesaian masalah yang diusulkan dengan menstimulasikan perhatian terhadap aktor. Penyelesaian diusulkan sedemikian hingga semua aktor yang terlibat terikat kepada suatu mekanisme kendali terpusat yang disebut dengan Obligatory Passage Point (OPP). (Yuliar, 2009)

Peneliti menganalisis momen problematisasi yang terjadi antar aktor di Proklam Angrek RW 06 ini kurangnya kesadaran masyarakat. Tingkat kepedulian warga yang tidak seragam menjadi tantangan para aktor pemerintah maupun aktor pendukung untuk melakukan upaya-upaya serta aksi. Masyarakat menerima kegiatan pembinaan, edukasi, dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara kontinu oleh aktor pemerintah dan juga aktor pendukung yang merangkulnya dengan meningkatkan komunikasi secara intensif dan berkesinambungan.

Menurut pendapat peneliti aktor pemerintah harus memberikan dukungan kepada aktor pelaksana untuk terus bangkit dan kreatif. Dalam membentuk jejaring aktor DLH Kota Tanjungpinang harus selalu mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi terhadap aktor pemerintah, pendukung dan pelaksana yang dimodelkan sebagai berikut:



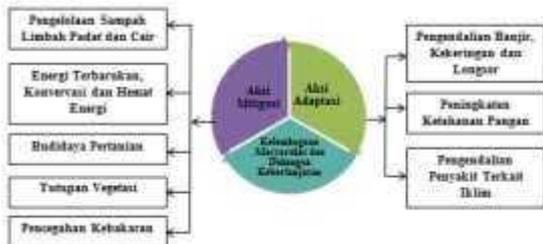
Gambar 2 Model Jejaring Aktor
Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Langkah awal yang dilakukan dalam menganalisis keberhasilan Program Kampung Iklim di Kelurahan Bukit Cermin khususnya di RW.06 dalam perspektif jejaring aktor dengan melakukan identifikasi aktor. Dalam hal ini DLH Kota Tanjungpinang selaku *Obligatory Passage Points* (OPP) atau aktor utama yaitu Pemerintah yang melakukan pendekatan kepada calon aktor baik yang bersedia bekerjasama atau menolak terlibat dalam menyelesaikan masalah perubahan iklim. *Moment of Problematization* ini terjadi pada saat DLH Kota Tanjungpinang selaku OPP melakukan inisiasi kepada aktor pelaksana yaitu masyarakat Kelurahan Bukit Cermin dan bekerjasama dengan aktor pendukung seperti Lembaga Swadaya Masyarakat Air Lingkungan dan Manusia (LSM ALIM).

2. Momen Penarikan (*Moment of Interestment*)

Interestment merupakan kumpulan tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas, aktor utama dalam mendorong keterlibatan aktor-aktor baru, menstabilkan jaringan yang terbentuk dengan melakukan identifikasi berdasarkan momen problematisasi. Jika inisiasi dalam momen problematisasi berhasil, para aktor yang terstimulasi mungkin saja mengikuti inisiasi tersebut dalam beragam cara termasuk menolak hal-hal yang diinisiasikan. Inisiator aksi tersebut harus melanjutkan inisiasinya dengan meyakinkan aktor-aktor lain bahwa apa yang diinisiasikan itu penting bagi aktor-aktor lain, atau dengan membingkai respons aktor-aktor yang lain (Nuryanto, 2019).

Pemerintah bekerjasama dengan aktor pendukung seperti LSM ALIM untuk melakukan koordinasi bersama masyarakat di Kelurahan Bukit Cermin untuk melakukan aksi-aksi dan peranan sesuai dalam Instruksi Walikota Tanjungpinang Nomor 299 Tahun 2021. Sebagai berikut:



Gambar 3 Aksi Proklam Angrek RW 06 Bukit Cermin

Sumber: Verifikasi Proklam Angrek RW 06, 2020.

Banyak aktor pemerintahan yang terlibat dalam menjalankan aksi mitigasi dan adaptasi di Proklam Angrek RW 06 Kelurahan Bukit Cermin yaitu Terdapat lima aksi mitigasi dalam perubahan iklim yaitu pertama, pengelolaan sampah limbah padat dan cair seperti pengumpulan, pewadahan, pengomposan skala rumah dan rumah kompos. Melakukan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan cara menghias wadah tanam, pembatas taman, dan komposter yang dijalankan oleh aktor Pemerintah yaitu DLH Kota Tanjungpinang yang bekerjasama dengan Dinas PUPR.



Gambar 4 Pengelolaan Sampah Limbah Padat dan Cair

Sumber: Verifikasi RW 06 Bukit Cermin

Kedua, aksi pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi seperti penggunaan panel surya, penggunaan lampu LED, dan himbuan hemat listrik. Aksi tersebut dijalankan oleh aktor Pemerintah yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Kawasan dan

Pertanian. Ketiga, aksi budidaya pertanian yang dilakukan oleh aktor Pemerintah yaitu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang menjalankan kegiatan seperti menggantikan pupuk kimiawi dengan kompos dan pupuk cair yang dihasilkan dan digunakan dari tanaman.



Gambar 5 Energi Terbarukan dan Budidaya Pertanian

Sumber: Verifikasi RW 06 Bukit Cermin

Aksi keempat yaitu tutupan vegetasi yang dijalankan oleh aktor Pemerintah yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Kawasan dan Pertanian. Kegiatan dari aksi tersebut ialah penghijauan pada kawasan dengan luasan 4 hektar. Jenis tanaman yang ditanam seperti ketapang kencana, flamboyan, tanaman buah serta *vertical garden* dan pergola.



Gambar 6 Tutupan Vegetasi

Sumber: Verifikasi RW 06 Bukit Cermin

Aksi kelima yaitu pencegahan kebakaran yang dilakukan oleh aktor Pemerintah diantaranya Lurah, Babinsa dan Babinkamtibnas. Kegiatan yang dilakukan berupa pemasangan hidran, adanya jalur evakuasi, pemasangan



Gambar 7 Pencegahan Khartula
 Sumber: Verifikasi RW 06 Bukit Cermin

Aksi adaptasi terdiri dari tiga aksi yaitu pertama, pengendalian banjir kekeringan dan longsor. Kegiatan dalam aksi ini seperti membuat peresapan air (biopori, sumur resapan air hujan, saluran pembuangan air, bidang resapan dan paving blok), hemat dalam penggunaan air, rancang bangun yang adaptif terhadap longsor, terasering, dan pemanenan air hujan. Aktor yang mengedukasi adalah Dinas Prumahan Rakyat, Permukiman Kawasan dan Pertamanan.



Gambar 8 Pengendalian Banjir, Kekeringan dan Longsor
 Sumber: Verifikasi RW 06 Bukit Cermin

Kedua, peningkatan ketahanan pangan memiliki beberapa kegiatan seperti budidaya ikan dan ayam perorangan/kelompok, budidaya tanaman hias serta obat, dan budidaya penangkaran anggrek. Aktor Pemerintah yang menjalankan aksi ini ialah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

leaflet, sosialisasi dan edukasi pada anak didik. Kelima, pencegahan dan penanggulangan karhutla. Kegiatan yang diberikan yaitu sosialisasi dan pemantauan oleh lurah Bukit Cermin, edukasi anak didik, pembuatan jalur evakuasi dan hydrant. Aktor yang terlibat ada Lurah Bukit Cermin, Babinsa dan Babinkamtibnas



Gambar 9 Peningkatan Ketahanan Pangan
 Sumber: Verifikasi RW 06 Bukit Cermin

Ketiga, aksi pengendalian penyakit terkait iklim adapun aktornya yaitu, Dinas Kesehatan.



Gambar 10 Pengendalian Penyakit Terkait Iklim
 Sumber: Verifikasi RW 06 Bukit Cermin

3. Momen Pelibatan (*Moment of Enrolment*)

Momen ini merupakan kelanjutan dari momen penarikan yaitu *Moment of Enrollment* atau momen pelibatan. Resistensi terhadap jejaring aktor yang terbentuk mulai teratasi dan pengaruhnya semakin tereduksi. Para aktor saling mendelegasikan peran dan wewenang diantara aktor satu dengan aktor lainnya.(Nuryanto, 2019)

Pada tahap ini DLH Kota Tanjungpinang dan aktor pendukung lainnya mampu menjadi mitra di Kelurahan Bukit Cermin dan menginisiasi aktor pelaksana yaitu masyarakat di Kelurahan Bukit Cermin agar memajukan Program Kampung Iklim. Dalam berbagai kesempatan DLH Kota Tanjungpinang berkerjasama dengan RW 06 di Kelurahan

Bukit Cermin untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat pentingnya menjaga yang lainnya sebagai pengemban amanah, penerus pesan, perwakilan, atau juru bicara.

Dalam momen pelibatan ini, inisiasi terus dilakukan untuk mendapatkan perhatian masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dan akibat dari perubahan iklim.

menjalankan peran mereka sudah terlihat dalam momen pelibatan ini.

Diketahui bahwa keterlibatan aktor di dalam Program Kampung Iklim adalah penting supaya resistensi penolakan didalam proses pelibatan tidak terjadi, hal ini pemerintah sampai aktor pelaksana berusaha dan berupaya untuk tetap berkomitmen dalam melaksanakan peranan sebagai aktor di dalam Program Kampung Iklim di Bukit Cermin. Menurut Ansell dan Gash dalam (Prastio et al., 2019) bahwa membangun komitmen dengan itikad baik melalui negosiasi adalah metode terbaik untuk tercapainya hasil yang diinginkan yang sebelumnya terdapat sikap saling pengakuan antar aktor. Kesuksesan kolaborasi tergantung pada tinggi rendahnya sifat ketergantungan antar aktor. Ketergantungan sangat tinggi antara aktor Pemerintah, aktor pendukung, dan aktor pelaksana sehingga aktor Pemerintah tidak boleh bersifat pasif terhadap aktor pelaksana dan membuka diri dalam memunculkan dialog antar anggota. Diharapkan lahirnya itikad baik dan penciptaan komitmen.

4. Momen Mobilisasi (*Moment of Mobilization*)

Ditahap ini aliansi akan terbentuk lebih besar dan kuat jika mendapatkan dukungan dari aktor lain yang tidak perlu nampak secara langsung karena diwakili oleh aktor lain. Jika proses mobilisasi telah berlangsung seperti ini maka mobilisasi berlangsung baik (Priyatma, 2013).

Dalam penelitian ini mobilisasi dalam kategori stabil karena semua aktor ikut berperan aktif dan berpartisipasi

alam sejak dini. Bila momen ini berhasil aktor-aktor saling berperan satu terhadap

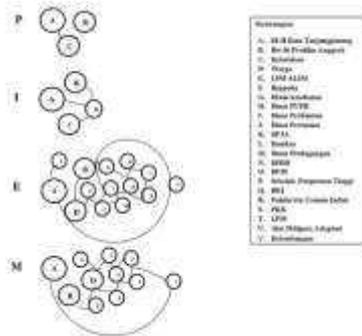
Inisiasi dilakukan aktor utama dan berupaya mentranslasikan kepada aktor-aktor seperti tokoh masyarakat yang ada di Bukit Cermin, tokoh agama, LSM, RT, RW, PKK, LPM, Pokdarwis, dan OPD lainnya. Pada tahap ini jaringan aktor sudah menampakkan diri. Aktor yang terlibat da

dalam mensukseskan Proklam Anggrek RW 06 sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawardhani, 2018) bahwa metode partisipatif merupakan upaya dalam mensukseskan program sehingga terjadinya mobilisasi yang stabil karena adanya dorongan dari pemerintah yang mengarahkan seluruh komponen masyarakat untuk terlibat mulai dari tahap pembentukan kelompok hingga pembinaan.

Pembahasan hasil dari penelitian *Moment of Mobilization* yaitu berhasil dalam membentuk jejaring aktor dalam Program Kampung Iklim Anggrek RW 06 di Kelurahan Bukit Cermin sehingga tercapainya mobilisasi yang stabil. Namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan seiring waktu dikarenakan adanya dinamika masyarakat dan pengaruh tingkat penerimaan masyarakat terhadap program. Misalnya keberhasilan mendapatkan banyak penghargaan di Proklam Anggrek RW 06 Kelurahan Bukit Cermin sebagai lokasi Program Kampung Iklim Kategori Utama yang telah aktif melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terintegrasi, sehingga dapat memberikan kontribusi upaya pengendalian perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa Program Kampung Iklim berjalan baik namun masih menjadi tantangan bagi aktor Pemerintah mengenai masalah kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk melanjutkan program hingga masa yang akan datang.

Berdasarkan pembahasan translasi pada *moment of problematization* (P), *moment of intersement* (I), *moment of*

enrollment (E), dan *moment mobilization* (M). Jejaring aktor yang terbentuk dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 11 Translasi model jejaring aktor Proklamasi Anggrek Kelurahan Bukit Cermin Sumber: Modifikasi peneliti

Keberhasilan penerapan jejaring aktor dalam Program Kampung Iklim di Kelurahan Bukit Cermin ini dapat dilihat dari peranan aktor yang terlibat di dalam program dan permasalahan di dalam kegiatan terselesaikan melalui upaya dan aksi- aksi yang dilakukan oleh aktor pemerintah, aktor pelaksana, pendukung, dan mitra swasta lainnya yang saling berkerjasama untuk mendorong penanggulangan perubahan iklim.

Hal ini dilakukan dengan cara edukasi, sosialisasi, masyarakat Kelurahan Bukit Cermin di bimbing dan dibina sehingga membentuk pribadi yang mandiri dan bertanggungjawab atas mengemban tugas dan peran di dalam Program Kampung Iklim ini. Sebagai aktor pelaksana yaitu masyarakat, tanpa dukungan dari masyarakat program ini tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu peran masyarakat sangat besar didalam program ini.

Keberhasilan penerapan jejaring aktor di dalam Program Kampung Iklim Kelurahan Bukit Cermin tercapai setelah terbentuknya jaringan aktor yang stabil melalui 4 tahapan translasi:

1. *Moment of Problematization* (Problematisasi), Pada momen ini masih terlihat belum optimal. Tujuan utama keterlibatan para aktor dalam kegiatan Program Kampung Iklim adalah mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya di Proklamasi

Anggrek RW 06 Kelurahan Bukit Cermin.

2. *Moment of Interessement* (Penerimaan), Pada tahap ini masih menjadi tantangan bagi aktor Pemerintah yaitu, DLH Kota Tanjungpinang selaku obligatory passage point (OPP) untuk meyakinkan masyarakat supaya terus melanjutkan kegiatan Program Kampung Iklim. Program ini memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan. Oleh karena itu, DLH Kota Tanjungpinang dibantu pelaksana Proklamasi Anggrek yaitu ketua RW 06 untuk menjalankan aksi mitigasi dan adaptasi. Para aktor menjalankan peranannya untuk menyadarkan masyarakat bahwa program ini sangat penting serta melibatkan aktor pendukung yaitu LSM ALIM.

3. *Moment of Enrollment* (Pelibatan), Pada tahap ini jaringan aktor sudah menampakkan diri. Aktor yang terlibat dan menjalankan peran mereka sudah terlihat dalam momen pelibatan ini. Inisiasi terus dilakukan untuk mendapatkan perhatian masyarakat terhadap permasalahan- permasalahan yang muncul dan akibat dari perubahan iklim. Inisiasi dilakukan aktor utama dan berupaya mentranslasikan kepada aktor- aktor seperti tokoh masyarakat yang ada di Bukit Cermin, tokoh agama, LSM, RT, RW, PKK, LPM, Pokdarwis, dan OPD lainnya.

4. *Moment of Mobilization* (Mobilisasi), Ditahap ini Proklamasi Anggrek RW 06 sudah mencapai kestabilan. Dapat dilihat dari peranan aktor yang terlibat didalam menjalankan aksi serta permasalahan yang terjadi di Proklamasi Anggrek RW 06 mulai terselesaikan. Adanya aksi- aksi dan peranan yang dilakukan oleh aktor pelaksana, aktor pendukung, dan aktor pemerintah ini memberikan dampak yang dirasakan masyarakat. Dampak ini memberikan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Bukit Cermin. Sehingga, kekuatan jejaring aktor mulai terbentuk kuat didalam Program kampung Iklim

SIMPULAN

Keberhasilan penerapan jejaring aktor di dalam Program Kampung Iklim Kelurahan Bukit Cermin tercapai setelah terbentuknya jaringan aktor yang stabil melalui 4 tahapan translasi:

1. *Moment of Problematization* (Problematisasi), Pada momen ini masih terlihat belum optimal. Tujuan utama keterlibatan para aktor dalam kegiatan Program Kampung Iklim adalah mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya di Proklam Anggrek RW 06 Kelurahan Bukit Cermin.
2. *Moment of Interestment* (Penerimaan), Pada tahap ini masih menjadi tantangan bagi aktor Pemerintah yaitu, DLH Kota Tanjungpinang selaku obligatory passage point (OPP) untuk meyakinkan masyarakat supaya terus melanjutkan kegiatan Program Kampung Iklim. Program ini memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan. Oleh karena itu, DLH Kota Tanjungpinang dibantu pelaksana Proklam Anggrek yaitu ketua RW 06 untuk menjalankan aksi mitigasi dan adaptasi. Para aktor menjalankan peranannya untuk menyadarkan masyarakat bahwa program ini sangat penting serta melibatkan aktor pendukung yaitu LSM ALIM.
3. *Moment of Enrollment* (Pelibatan), Pada tahap ini jaringan aktor sudah menampakkan diri. Aktor yang terlibat dan menjalankan peran mereka sudah terlihat dalam momen pelibatan ini. Inisiasi terus dilakukan untuk mendapatkan perhatian masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dan akibat dari perubahan iklim. Inisiasi dilakukan aktor utama dan berupaya mentranslasikan kepada aktor-aktor seperti tokoh masyarakat yang ada di Bukit Cermin, tokoh agama, LSM, RT, RW, PKK, LPM, Pokdarwis, dan OPD lainnya.
4. *Moment of Mobilization* (Mobilisasi), Ditahap ini Proklam Anggrek RW 06 sudah mencapai kestabilan. Dapat dilihat dari peranan aktor yang terlibat didalam menjalankan aksi serta permasalahan yang terjadi di Proklam Anggrek RW 06 mulai terselesaikan. Adanya aksi-aksi dan peranan yang dilakukan oleh aktor pelaksana, aktor pendukung, dan aktor pemerintah ini memberikan dampak yang dirasakan masyarakat. Dampak ini memberikan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Bukit Cermin. Sehingga, kekuatan jejaring aktor mulai terbentuk kuat didalam Program kampung Iklim.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Alhogbi, B. G. (2017). Jejaring Aktor Dalam Corporate Social Responsibility (CSR) Studi Tentang Pengeolaan Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Periode 2008-2012. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25.
<http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Ismiartha, G. R., Santoso, R. S., & Hanani, R. (2021). Analisis Stakeholders 65991-1-SM.pdf
- Kusumawardhani, A. I. (2018). Jejaring Aktor Inovasi Dalam Pelaksanaan Badan Usaha Lorong (BULO) Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar. In *Nhk技研* (Vol. 151, Issue 2).
- Masripatin, N. (2017). *Road Map Program Kampung Iklim (Proklim)*.
- Nuryanto, A. (2019). Keberhasilan Dan Dampak Penerapan Sistem Informasi Desa Dalam Perspektif Actor Network Theory (Studi Kasus di Desa Ngumbul Kabupaten Pacitan). *Prosiding Seminar Nasional Geotik 2019, March*, 65–76.
- Prastio, L. O., Suwaryo, U., & Yuningsih, N. Y. (2019). Aktor Terhadap Proses Kolaborasi Pada Program Pemagangan Nasional Di Kabupaten. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(2), 200–223.
- Priyatma, J. E. (2013). Potensi Teori Jejaring Aktor untuk Memahami Inovasi Teknologi. *Seminar Nasional RITEKTRA 2013 (Riset Dan Teknologi Terapan)*.
<https://repository.usd.ac.id/4456/>
- Republic of Indonesia. (2016). *Nationally Determined Contribution (NDC) Pertama Republik Indonesia*. 1–18.
http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/ndc/terjemahan_NDC.pdf
- Wahyu, K. (2019). Analisis Kebijakan Program Kampung Iklim (PROKLIM) Di Kota Tanjungpinang. *Program Studi Ilmu Administrasi Negara*, 219–223.
- Buku:**
- Yuliar, S. (2009). *Tata Kelola Teknologi :Perspektif Teori Jaringan-Aktor* (cetakan 1). Penerbit ITB, Jl. Ganesa 10, Bandung 40132.
- Website:**
- Lintaskepri.com. (2020). *DLH: Ada Tiga Manfaat Program Kampung Iklim*. Lintaskepri.com.
<https://lintaskepri.com/dlh-ada-tiga-manfaat-program-kampung-iklim.html>

Ogen. (2020). *Kota Tanjungpinang sabet penghargaan ProKlim 2020 dari KLHK*. Antaranews.com.
<https://www.antaranews.com/berita/1802981/kota-tanjungpinang-sabet-penghargaan-proklim-2020-dari-klhk>

Dokumen:

Instruksi Walikota Tanjungpinang Nomor

299 Tahun
2021

PerDirjenPPI. (2017). *PerDirjenPPI No. P1.PPI/SET/KUM.I/2/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim*.

PerMenLHK. (n.d.). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup*